

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA IKAN LELE  
KOLAM TERPAL DI DESA KEDUKBEMBEM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN  
LAMONGAN**

**Ilyas Imron Hidayat**

Prodi S1 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) e-mail: ilyas.imron09@gmail.com

**Weni Rosdiana, S.Sos.,M.AP.**

NIP: 197909232009122003

(Ilmu Administrasi Negara FISH, UNESA), alamat email: wenirosdiana@gmail.com

**Abstrak**

Program pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal yang ada di Desa Kedukbembem merupakan bagian daripada program Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan program GEMERLAP yang diresmikan pada tahun 2011 dan berlandaskan hukum pada Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2011. program tersebut secara garis besar bertujuan untuk mendukung usaha masyarakat di pedesaan seperti salah satunya usaha budidaya ikan lele oleh Pokdakan yang ada Desa Kedukbembem. Sejak diimplementasikannya program tersebut ditahun 2012 ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak ada kelanjutan monitoring penyuluhan dari pelaksana kurangnya koordinasi antara sasaran program dengan pelaksana, sehingga dari hal tersebut diperlukan sebuah studi implementasi dengan dasar teori Merilee S. Grindle tentang faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Implementasi Program Pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal yang ada di Desa Kedukbembem. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan berdasarkan pada faktor penentu keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari implementasi program GEMERLAP dalam program pengembangan budidaya lele di Desa Kedukbembem sudah menjelaskan kepentingan, manfaat program sudah bisa dirasakan kelompok sasaran, target perubahan masih belum optimal, letak pengambilan keputusan sudah sesuai dengan pertimbangan, Implementor kebijakan sudah jelas dan tepat, Sumber daya yang dialokasikan dari sudah dapat dirasakan dampak positifnya oleh kelompok sasaran program. Sedangkan dari variabel lingkungan kebijakan, dari semua pihak yang terlibat mempunyai peranan yang sama penting, kepentingan dari anggota Pokdakan berbeda antara satu dengan yang lain tentu bisa berdampak pada keberhasilan program, strategi dari pelaksana sudah bagus, karakteristik lembaga dari Dinas Perikanan melaksanakan tugas seperti dengan amanat dari program, respon dari pelaksana dalam menanggapi keluhan sudah bagus tinggal tingkat kepatuhan dari Pokdakan dan koordinasi antar pihak terkait yang perlu diperbaiki.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program GEMERLAP

**Abstract**

Programs Cultivation Area Development Catfish Swimming Sheeting in Kedubembem Village is part of the Local Government program Lamongan GEMERLAP program which was inaugurated in 2011 and is based on the law Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2011. The program broadly aims to support efforts in rural communities such as the one catfish farming by existing Pokdakan Kedukbembem village. since the implementation of the program in 2012 found several problems as there is no continuation of monitoring the extension of implementing a lack of coordination between the program objectives by implementing, so from that required a study of

the implementation of the basic theory of Merilee S. Grindle on the critical success factors of policy implementation.

The purpose of this study is to describe and analyze relevant Implementation of Development Programs Cultivation Area Development Catfish Swimming Sheeting in Kedubembem Village. This type of research is descriptive qualitative approach. Data collection techniques used through interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed with data reduction, data presentation and draw conclusions based on the critical success factors of implementation proposed by Merilee S. Grindle.

The results showed that the overall study of the implementation GEMERLAP program in the Development Programs Cultivation Area Development Catfish Swimming Sheeting in Kedubembem Village already explained the importance, the benefits of the program could be felt the target group, the target of the change is still not optimal, where the decision is in conformity with the judgment, Implementor policy is clear and precise, resources allocated from the positive impact can already by the target. While the environment variable policies, all parties involved have a role that is equally important, the interests of members Pokdakan different from one another can certainly have an impact on the success of the program, the strategy of implementing already good, the characteristics of the institution of the Department of Fisheries carry out tasks such as the mandate of course, the response of the executor in response to complaints have been nice to stay the level of compliance of Pokdakan and coordination between the parties involved that need to be repaired.

Keywords: Keywords: Policy Implementation, Program GEMERLAP

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional melalui pemberian otonomi secara luas dan bertanggung jawab bagi setiap daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, pada dasarnya bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat seutuhnya. Hal itu disebabkan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wujud dari otonomi daerah tersebut seperti kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat suatu produk kebijakan publik dalam ruang lingkup daerah seperti Peraturan Daerah (PerDa) atau Peraturan Bupati (PerBup) dalam rangka mendayagunakan segala potensi didaerah secara optimal dan terpadu, dan sebagai *instrumen* untuk mengatasi persoalan atau

isu-isu terkait masalah pembangunan yang terjadi di daerah tersebut.

Konsep dasar kehadiran kebijakan publik (*public policy*) itu sendiri adalah untuk memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara tepat dan benar, bisa dikatakan kebijakan publik bertujuan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi maupun aspek budaya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik, karena suatu kebijakan akan hanya menjadi sebuah aturan yang sudah diciptakan dengan tujuan di dalamnya, akan tetapi tidak bisa meraih tujuan tersebut bila tidak diimplementasikan dengan baik.

Kabupaten Lamongan merupakan daerah di provinsi Jawa Timur dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dimana pertanian masih menjadi sektor unggulan daerah didukung sektor peternakan, perikanan dan sektor-sektor lainnya. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil dimana Kabupaten Lamongan memiliki 474 desa/kelurahan

(terbanyak nomor dua se-Indonesia) dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 1.499.971 jiwa dan 1.348.259 jiwa ditahun 2013 (sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang bertempat tinggal, berkeluarga, dan bermatapencaharian di desa, baik disektor pertanian, peternakan, perikanan, pedagang ataupun usaha lainnya. Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri, selama ini terus melakukan pembangunan dan pembenahan di segala bidang termasuk pada daerah pedesaan sebagai upaya mengoptimalkan sumberdaya alam lokal agar bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah serta bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan bisa dibilang mengalami peningkatan dalam rentan waktu 2008 sampai 2011 (sumber: Lamongan Dalam Angka 2012), namun yang menjadi masalah adalah trend positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita masyarakat secara signifikan. Disisi lain, kesenjangan kota dan desa dalam skala prioritas pembangunan masih menjadi isu permasalahan di Kabupaten Lamongan mengingat sebagian besar wilayah Lamongan adalah daerah pedesaan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya pembangunan daerah pedesaan diwujudkan dengan mengeluarkan produk kebijakan daerah di tahun 2011 yang diberi nama program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan atau disingkat dengan program Gemerlap. Salah satu Desa yang menerima bantuan dari program Gemerlap adalah Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup. pada akhir tahun 2012 Pokdakan Desa Kedukbembem menerima bantuan program Gemerlap untuk pengembangan budidaya ikan lele berupa sepuluh paket perlengkapan budidaya dimana setiap paketnya terdiri atas satu kolam terpal untuk media budidaya, dua karung/100 kg pakan ikan, 1200 benih ikan lele, dan satu buah mesin pompa air yang disalurkan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Setelah

diberikannya bantuan tersebut, Podakan Desa Kedukbembem bersamaan dengan Pokdakan dari desa-desa lain yang juga diberi pelatihan oleh penyuluh dari Dinas Perikanan dan Kelautan tentang metode pembudidayaan ikan lele kolam terpal yang tepat. Kemudian pertengahan tahun 2013, Pokdakan Desa Kedukbembem menerima bantuan tambahan lagi berupa 12 kolam terpal, waring (jaring ikan), mesin giling dan mesin pengering untuk membuat pakan ikan buatan yang memang sebelumnya pokdakan juga sudah diberi pelatihan oleh penyuluh Dinas Perikanan dan Kelautan tentang membuat pakan lele buatan dengan bahan organik dan untuk benih ikannya dari swadaya Pokdakan itu sendiri. Untuk perkembangan anggota dari Pokdakan Desa Kedukbembem sendiri ketika peneliti observasi di tahun 2015 tercatat ada 17 orang yang masuk dalam keanggotaan Pokdakan Desa Kedukbembem.

Namun berdasarkan hasil temuan dilapangan, terdapat beberapa permasalahan terkait program pengembangan kawasan budidaya ikan lele yang dialami oleh Pokdakan Desa Kedukbembem selaku kelompok sasaran program diantaranya adalah tidak ada kelanjutan monitoring atau penyuluhan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan ke Pokdakan Desa Kedukbembem sebagai sasaran dari program pengembangan budidaya ikan lele air terpal, hal itu memungkinkan bagi kelompok sasaran melakukan kesalahan dalam pengelolaan usaha budidaya lele secara benar sehingga berdampak pada kegagalan panen. Selanjutnya persoalan tentang informasi Pokdakan akan ketersediaan benih ikan lele yang bagus dan kebutuhan informasi untuk akses pemasaran yang lebih luas agar nilai jual produk ikan lele Pokdakan lebih optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Lele Kolam Terpal Di Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan”**.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Mendeskripsikan terkait implementasi program pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal di Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terstruktur. Narasumbernya adalah orang-orang yang dinilai kompeten berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan budidaya lele di Desa Kedukbembem yaitu Bapak David As'adi selaku pihak Sekretariat program Gemerlap dari Bappeda Lamongan, Ibu Panca Refti selaku pelaksana teknis program budidaya ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Bapak Markat selaku ketua Pokdakan Desa Kedukbembem beserta anggotanya. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori model analisis interaksi dari Miles and Huberman (Sugiyono, 2014: 20)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi program pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal di Desa Kedukbembem jika mengacu pada teori keberhasilan implementasi Merilee S. Grindle dimana terdapat dua variabel yang berpengaruh yang variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan, berikut uraiannya:

### **1. Variabel isi kebijakan**

#### **a. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan pasti melibatkan berbagai kepentingan di dalamnya, hal itu tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil temuan peneliti selama dilapangan sehubungan dengan diimplementasikannya program Gemerlap dalam program pengembangan kawasan budidaya

ikan lele kolam terpal yang ada di Desa Kedukbembem diketahui bahwa kepentingan dari dibuatnya program Gemerlap dalam pengembangan budidaya ikan lele di Desa Kedukbembem adalah sebagai upaya penguatan bagi usaha kelompok masyarakat pedesaan untuk bisa mengoptimalkan sumberdaya yang ada disekitar, dengan adanya bantuan dari program tersebut diharapkan mampu menciptakan suatu kawasan yang memiliki produk unggulan dari hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Maka dalam hal ini untuk program pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal di Desa Kedukbembem adalah sebagai dukungan kepada Pokdakan Desa Kedukbembem bisa mengembangkan usaha budidaya ikan lele di desa tersebut dan menciptakan sebuah kawasan atau sentra dengan produk unggulan berupa ikan lele.

#### **b. Jenis manfaat yang diterima**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis manfaat dari diimplementasikannya program pengembangan kawasan budidaya ikan lele di Desa Kedukbembem adalah penyediaan sarana pendukung untuk budidaya ikan lele seperti kolam terpal, penyediaan bibit ikan lele, pakan ikan, dan sebagainya ada juga pelatihan dari Dinas Perikanan untuk Pokdakan tentang metode budidaya lele secara benar. Selain itu dari Dinas juga akan membantu untuk informasi pemasaran dari hasil produk ikan lele budidaya. Berdasarkan keterangan dari beberapa anggota Pokdakan Desa Kedukbembem jenis manfaat dari program yang berupa bantuan alat sudah bisa dirasakan oleh kelompok dan menunjukkan dampak yang positif.

#### **c. Derajat perubahan yang ingin dicapai**

Suatu kebijakan harus memiliki ukuran perubahan yang ingin

dicapai dari adanya kebijakan tersebut dan skala perubahannya haruslah jelas dengan demikian suatu kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan.

Dalam program pengembangan budidaya ikan lele di Desa Kedukbembem dikatakan sebelumnya bahwa perubahan yang ingin dicapai dari program tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat khususnya yang ada di daerah pedesaan melalui penguatan kelompok usaha masyarakat dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Program tersebut juga sebagai upaya untuk menciptakan suatu kawasan yang memungkinkan di wilayah tersebut bisa memunculkan dan menunjukkan potensi sebagai kawasan budidaya ikan lele. Dari hasil penelitian bisa dikatakan bahwa jika didasarkan untuk tujuan menambah pendapatan dari anggota Pokdakan Desa Kedukbembem program bisa dikatakan berhasil, namun jika perubahan yang ingin dicapai untuk menciptakan sebuah kawasan budidaya lele hal tersebut belum berhasil diwujudkan mengingat tolak ukurnya juga belum jelas.

**d. Letak pengambilan keputusan**

Letak pengambilan keputusan dari program pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal ini dilaksanakan di Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan yang menjadi kelompok sasaran adalah kelompok budidaya ikan (Pokdakan) Desa Kedukbem. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan berdasarkan pengamatan di lokasi penetapan Pokdakan Desa Kedukbembem sebagai sasaran program dinilai peneliti sudah tepat karena didasarkan atas pertimbangan bahwa dari anggota Pokdakannya sendiri sebelumnya sudah pernah menggeluti usaha budidaya ikan lele dan letak dari Desa Kedukbembem sendiri strategis kondisi alam yang sebagian besar wilayah hutan dengan

adanya sumber air yang melimpah dimungkinkan berhasil untuk mengembangkan budidaya ikan lele khususnya dalam media kolam terpal.

**e. Pelaksana program/program implementor**

Variabel kejelasan implementor kebijakan merupakan hal yang penting menurut Grindle karena dengan implementor yang jelas, maka pengimplementasian kebijakan akan lancar. Sehubungan dengan hal tersebut, struktur implementor untuk pelaksanaan program Gemerlap dalam pengembangan budidaya ikan lele kolam terpal di Desa Kedukbembem secara teknis ditangani oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang dibantu tenaga ahli profesional (NGO) dengan pengawasan dari pihak Bappeda.

Untuk Pelaksana program dari Dinas Perikanan sudah tepat karena disesuaikan dengan bidang yang ditangani, yang menjadi permasalahannya adalah pihak dari Dinas yang juga berfungsi menjadi pendamping Pokdakan tidak bisa selalu memonitoring kegiatan budidaya Pokdakan ke lokasi secara langsung. Hal itu dikarenakan jarak antara Dinas terkait dengan lokasi dari Pokdakan cukup jauh, selain itu hal yang ditangani pendamping dari Dinas perikanan memiliki cakupan luas, dan tidak ada anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penyuluhan lanjutan ke Pokdakan.

**f. Sumber daya yang digunakan**

Sumber daya merupakan variabel yang penting kaitannya dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena dengan adanya sumber daya lah kebijakan akan bisa diimplementasikan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia maupun non-manusia. Sumber daya manusia yang dialokasikan di dalam implementasi program pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal di Desa Kedukbembem ini adalah seluruh implementor kebijakan yang

terlibat, dalam hal ini adalah tim pelaksana program Gemerlap diantaranya petugas pengawas program dari Bappeda, petugas pendamping dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan dari tenaga ahli profesional yang diperbantukan dalam pelaksanaan program kaitannya dalam memberikan arahan kepada Pokdakan serta memberi bekal pengetahuan.

Untuk sumber daya non-manusia yang dialokasikan dalam implementasi program ini adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan budidaya ikan lele seperti kolam terpal, pakan ikan untuk sekali panen, bibit ikan sekali panen, mesin pompa air diberikan dalam bentuk paket yang diperuntukkan bagi Pokdakan Desa Kedukbembem. Selain itu juga dialokasikan satu unit mesin giling dan satu unit mesin pengering pakan yang diberikan pada akhir tahun 2013.

Pemberian bantuan berupa alat pendukung untuk kegiatan budidaya serta pemberian pelatihan tentang metode budidaya lele yang baik untuk Pokdakan, dirasa sudah tepat karena sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota Pokdakan Desa Kedukbembem juga merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan.

## **2. Variabel lingkungan kebijakan**

### **a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat**

Faktor lingkungan kebijakan yang pertama adalah kekuasaan, dimana kekuasaan implementor yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program Gemerlap bidang perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Dinas Perikanan disini berperan dalam mengusulkan Pokdakan untuk bisa terpilih sebagai kelompok sasaran program, pendistribusian bantuan kepada kelompok sasaran, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk memberikan pelatihan kepada

Pokdakan tentang metode budidaya ikan lele.

Untuk faktor kepentingan, dari hasil observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa tidak semua anggota Pokdakan Desa Kedukbembem konsisten didalam menjalankan kegiatan budidaya ikan lele bahkan ada beberapa anggota yang sudah menjual sarana budidayanya seperti kolam terpal, hal itu menunjukkan bahwa antar anggota dari Pokdakan Desa Kedukbembem memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lainnya.

Sedangkan untuk strategi yang dijalankan sebenarnya sudah cukup bagus dimana dilakukan monitoring ke lokasi budidaya dari Pokdakan untuk mengetahui apakah ada kendala dari Pokdakannya selama masa pengelolaan budidaya lele serta dari Pokdakan juga dimintai laporan tertulis untuk perkembangan hasil produksi panen lele dalam periode tertentu, tetapi dalam hal ini dituntut konsistensi dari pihak pelaksana juga dari pihak Pokdakan jangan gencar diawal-awalnya saja.

### **b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa**

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam hal ini adalah bagaimana Implementor dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mengimplementasikan program pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal di Desa Kedukbembem. Jadi pada dasarnya Dinas Perikanan melaksanakan program ini dengan rasa kepedulian akan tercapainya tujuan dari program dimana hal ini terlihat dari usaha implementor untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dari Pokdakan itu sendiri dengan telah diwujudkan beberapa usulan bantuan yang diterima oleh Pokdakan Desa Kedukbembem selama program Gemerlap ini berjalan.

### **c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas**

Untuk kepatuhan dari Pokdakan Desa Kedukbembem di awal pelaksanaan program tahun 2012 bisa dibbilang cukup mematuhi apa yang disampaikan oleh pendamping dari Dinas Perikanan, hal itu dibuktikan dengan menyetorkan laporan perkembangan produksi Pokdakan secara berkala, namun dalam satu tahun berikutnya tahun 2013 dari Pokdakan Desa Kedukbembem sudah tidak lagi menyertorkan laporan. Responsivitas dari pihak pendamping Dinas Perikanan ketika mendapat keluhan dari Pokdakan Desa Kedukbembem bisa dibbilang tanggap meskipun saran dan masukan disampaikan kepada Pokdakan melalui telephone. Hal tersebut sudah dimaklumi oleh Pokdakan mengingat jarak antara Dinas Perikanan dengan Desa Kedukbembem cukup jauh sekitar 30 km.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap Implementasi program pengembangan kawasan budidaya ikan lele kolam terpal di Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, jika didasarkan atas teori Grindle dapat disimpulkan sudah cukup baik karena sudah berdampak positif pada kelompok sasaran.

Dari variabel lingkungan kebijakan kekuasaan implementor yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program Gemerlap bidang perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang berperan dalam, pendistribusian bantuan kepada kelompok sasaran, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, Kepentingan yang terlibat diantara aktor belum menunjukkan kesamaan kepentingan sehingga bisa menghambat keberhasilan implementasi dari program itu sendiri. Strategi yang diterapkan untuk memonitoring kelokasi Pokdakan dan meminta laporan perkembangan untuk hasil panen dari Pokdakan sebenarnya juga sudah bagus tinggal

tindakan nyata saja yang dibutuhkan agar semua itu dapat berjalan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa

Dinas Perikanan melaksanakan program ini dengan rasa kepedulian akan tercapainya tujuan dari program dimana hal ini terlihat dari usaha implementor untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dari Pokdakan itu sendiri dengan telah diwujudkan beberapa usulan bantuan yang diterima oleh Pokdakan Desa Kedukbembem selama program Gemerlap ini berjalan.

Dari tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran diketahui respon yang dimunculkan oleh Pokdakan adalah positif dalam arti dari pihak Pokdakan senang dengan adanya bantuan dari program tersebut, akan tetapi tingkat kepatuhan dari anggota Pokdakan dalam menjalankan himbuan dari pendamping juga sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari sudah tidak adanya laporan tertulis tentang perkembangan hasil produksi dari Pokdakan yang dilaporkan ke pendamping dari Dinas Perikanan.

### **Saran**

Setelah mengetahui hasil analisis dari Program Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Lele yang ada di Desa Kedukbembem, maka penulis memberikan rekomendasi saran untuk menjadi pertimbangan agar program tersebut bisa berlanjut dengan melakukan perbaikan atas hal-hal yang kurang sesuai yaitu pada

1. Target perubahan yang ingin dicapai dari program harus jelas ada tolak ukurnya dan tidak terkesan sebagai hal yang tidak masuk akal,
2. Menyelesaikan kendala dana yang dialami Pokdakan dengan menambah anggaran dana untuk pelaksanaan program selanjutnya yang lebih tertata,
3. Dari segi koordinasi yang lebih intensif lagi antara pihak-pihak yang terkait dalam implementasi program yaitu dari pihak Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Ketua Pokdakan untuk membahas keberlanjutan dari program tersebut,
4. Jika dibutuhkan, bisa dibuat UPT Dinas Perikanan atau bisa dibentuk lembaga non-pemerintah yang terdekat dengan lokasi Pokdakan yang berfungsi untuk melakukan tugas monitoring dan evaluasi ke lokasi usaha budidaya dari Pokdakan

agar lebih terarah dan menjaga konsistensi dari anggota Pokdakan itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan*. Bandung: Humaniora Ilmu.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Cetakan VII. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Patilima, Hammid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Soenarko. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, Teguh Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*.

Surakarta: UNS Press.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

**Sumber Internet** (diakses 15 Juli 2016)

<http://lamongankab.bps.go.id>

<http://lamongan.go.id/instansi/Bappeda/Gemeralap>